

Urgensi Pelatihan Ekonomi Digital bagi Pekerja Anak: Studi Kasus Kecamatan Sragi, Pekalongan

Ari Arisman¹, Raisa Hilia Aini Syifa²

Universitas Perjuangan, Tasikmalaya, Indonesia¹

Universitas Cipasung, Tasikmalaya, Indonesia²

ari@unper.ac.id¹, raisa.billia2019@uncip.ac.id²

Diserahkan tanggal 15 Oktober 2025 | Diterima tanggal 25 Desember 2025 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2025

Abstract:

This study examines the urgency of digital economy training as an effort to mitigate the phenomenon of child labor among school-age youth in Sragi District, Pekalongan Regency, Central Java. Using a qualitative case study approach with descriptive-analytical methods, this research explores the socio-economic conditions, motivations, and challenges faced by children aged 16–18 who work instead of pursuing formal education. Data were collected through semi-structured interviews, observation, and documentation involving several key informants, including child workers, community leaders, and local entrepreneurs. The findings reveal that economic pressure, family disharmony, and limited access to education are the primary factors driving school dropout and child labor. Nevertheless, most informants exhibit strong motivation to continue learning through non-formal education such as PKBM and show interest in digital economic activities, including e-commerce and freelance work. The study concludes that digital economy training can serve as an empowerment medium, enhancing human capital and providing sustainable livelihood alternatives for marginalized youth. These findings reinforce empowerment and human capital theories, emphasizing the need for community-based digital training integrated with non-formal education programs.

Keywords: child labor, digital economy, empowerment, human capital, non-formal education

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji urgensi pelatihan ekonomi digital sebagai upaya untuk menanggulangi fenomena pekerja anak di kalangan remaja usia sekolah di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dan metode deskriptif-analitis, penelitian ini mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi, motivasi, serta tantangan yang dihadapi oleh anak-anak berusia 16–18 tahun yang bekerja alih-alih melanjutkan pendidikan formal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan beberapa informan kunci, termasuk pekerja anak, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, disharmoni keluarga, serta keterbatasan akses pendidikan menjadi faktor utama penyebab putus sekolah dan keterlibatan anak dalam dunia kerja. Meskipun demikian, sebagian besar informan memiliki motivasi kuat untuk tetap belajar melalui pendidikan non-formal seperti PKBM dan menunjukkan minat terhadap aktivitas ekonomi digital, termasuk e-commerce dan pekerjaan lepas (freelance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan ekonomi digital dapat menjadi sarana pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan modal manusia serta menyediakan alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi remaja marginal. Temuan ini memperkuat teori pemberdayaan dan modal manusia, sekaligus menekankan perlunya pelatihan digital berbasis komunitas yang terintegrasi dengan program pendidikan non-formal.

Kata Kunci: pekerja anak, ekonomi digital, pemberdayaan, modal manusia, pendidikan non-formal

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Permasalahan terkait anak yang bekerja pada rentang usia 15–18 tahun di Indonesia bukanlah fenomena baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan kelompok usia tersebut dalam kategori pekerja muda berusia 15–24 tahun. Berdasarkan laporan BPS, terdapat sedikitnya 18.421.906 orang di kelompok usia ini yang telah bekerja, sementara 3.549.928 orang lainnya tergolong pengangguran (Badan Pusat Statistik, 2025, p. 91). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar remaja Indonesia telah memasuki dunia kerja lebih dini dibanding usia ideal untuk menempuh pendidikan menengah atas. Padahal, amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fenomena pekerja anak di usia sekolah memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan di tengah masyarakat yang sedang bergerak menuju transformasi digital. Dilema muncul ketika di satu sisi anak-anak turut membantu meringankan beban ekonomi keluarga, namun di sisi lain, keterlibatan mereka dalam dunia kerja mengorbankan hak dasar untuk memperoleh pendidikan dan masa tumbuh kembang yang layak (Fitriana et al., 2025, p. 74; Kusnanto et al., 2024, p. 193). Idealnya, masa remaja merupakan periode untuk belajar, bermain, dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Akan tetapi, tekanan ekonomi keluarga serta keterbatasan akses pendidikan membuat banyak anak di bawah usia 18 tahun terlibat dalam aktivitas ekonomi, termasuk di sektor informal dan industri (Pungkasari, 2023, p. 13665).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar sembilan tahun, dan kemudian memperluasnya menjadi tiga belas tahun, dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pemerataan pendidikan, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural (Mustainah et al., 2025, p. 249). Pendidikan yang diklaim “gratis” tetap memerlukan biaya tambahan, seperti kebutuhan perlengkapan sekolah, kegiatan tahunan (misalnya studi wisata dan wisuda), yang kerap membebani keluarga berpenghasilan rendah. Selain itu, keterbatasan daya tampung sekolah menengah atas di beberapa kecamatan, yang umumnya hanya memiliki tiga hingga lima lembaga pendidikan, memperparah situasi. Akibatnya, tidak semua lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan secara formal (Fauzan et al., 2025, p. 857).

Sebagian remaja kemudian memilih melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau program kejar paket sembari bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Sebagian lainnya bahkan tidak lagi melanjutkan pendidikan karena alasan finansial. Kondisi ini menjadi sangat memprihatinkan, sebab keterbatasan akses pendidikan akan mempersempit peluang karier mereka di masa depan. Jenis pekerjaan yang tersedia bagi kelompok ini umumnya bersifat kasar atau harian, dengan tingkat pendapatan rendah dan ketidakpastian kerja yang tinggi (Ratih, 2025, p. 49).

Dalam konteks tersebut, pelatihan ekonomi digital dapat menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi persoalan pekerja anak sekaligus memberdayakan remaja putus sekolah. Menurut laporan *McKinsey Global Institute*, perkembangan otomasi dan digitalisasi akan menggantikan sekitar 23 juta lapangan kerja tradisional, namun di sisi lain juga akan menciptakan 10 juta peluang kerja baru di bidang ekonomi digital (Das et al., 2019, p. 5). Peluang ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh generasi muda yang secara alamiah telah akrab dengan teknologi. Dengan pelatihan yang tepat, mereka dapat memperoleh keterampilan digital yang relevan untuk mendukung kemandirian ekonomi sekaligus melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan dua landasan utama: Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) oleh Julian Rappaport dan Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) oleh Gary S. Becker. Teori pemberdayaan menjelaskan bagaimana individu dan komunitas dapat

memperoleh kendali atas kehidupannya melalui peningkatan kapasitas, partisipasi sosial, dan kesadaran kritis terhadap lingkungannya. Sementara itu, teori modal manusia menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan keterampilan sebagai sarana meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan ekonomi individu. Kedua teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana pelatihan ekonomi digital dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia muda yang terpinggirkan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroti isu terkait, Haniyah (2023) menegaskan pentingnya regulasi perlindungan pekerja anak melalui instrumen hukum nasional dan internasional, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri, hingga ketentuan ILO. Sementara itu, Muna & Aenurofik (2023) menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital memengaruhi gaya hidup dan perilaku generasi muda, yang semakin bergantung pada teknologi untuk memperoleh pengakuan sosial dan ekonomi. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengaitkan pelatihan ekonomi digital dengan upaya pemberdayaan anak pekerja dan peningkatan akses pendidikan non-formal di wilayah semi-perdesaan.

Dari celah inilah penelitian ini menemukan gap: belum adanya kajian yang mengaitkan antara pemberdayaan anak pekerja melalui pelatihan ekonomi digital dengan konteks sosial, ekonomi, dan pendidikan di tingkat komunitas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah utama: (1) bagaimana kondisi sosial ekonomi dan motivasi anak-anak yang bekerja di usia sekolah, dan (2) apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam mengakses pendidikan serta keterampilan ekonomi digital. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi anak-anak putus sekolah yang bekerja di usia 16–18 tahun serta menganalisis potensi pelatihan ekonomi digital sebagai strategi pemberdayaan dan upaya penanggulangan pekerja anak. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai pendidikan non-formal dan ekonomi digital, sementara secara praktis, diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga sosial, dan PKBM dalam merancang program pelatihan berbasis digital yang adaptif terhadap kebutuhan generasi muda.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pendekatan studi kasus dipilih karena dinilai mampu menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam fenomena sosial-ekonomi yang kompleks, khususnya terkait dengan kondisi anak-anak yang bekerja di usia sekolah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial yang melingkupi para informan, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang memengaruhi keputusan mereka untuk bekerja sejak usia muda (Sugiyono, 2020).

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan dua landasan utama sebagai pisau analisis, yaitu Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*) yang dikemukakan oleh Julian Rappaport dan Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang diperkenalkan oleh Gary Becker. Teori pemberdayaan menekankan pentingnya kemampuan individu dan komunitas dalam mengontrol kehidupannya melalui peningkatan kapasitas diri, sedangkan teori modal manusia menyoroti peran investasi pada pendidikan dan keterampilan sebagai faktor penentu peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kedua teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelatihan ekonomi digital dapat menjadi sarana pemberdayaan yang efektif bagi anak-anak putus sekolah agar mampu keluar dari siklus pekerja anak dan menuju kemandirian ekonomi (Becker, 1992, p. 88; Rappaport, 1995, p. 798).

Penelitian ini melibatkan 10 informan kunci sebagaimana tabel 1, yang dipilih secara purposive berdasarkan keterkaitan mereka dengan isu pekerja anak dan ekonomi lokal. Informan terdiri dari enam anak muda yang bekerja di usia sekolah (16–21 tahun), dua pemilik usaha kecil di sektor informal, serta dua pemangku kebijakan di atingkat desa dan kabupaten. Pemilihan ini

didasarkan pada relevansi pengalaman pendidikan, keterlibatan dalam kegiatan ekonomi lokal, serta kemampuan memberikan data faktual yang menggambarkan kondisi lapangan secara autentik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pandangan triangulatif dari berbagai aktor yang berperan langsung maupun tidak langsung terhadap isu pekerja anak.

Tabel 1 Daftar Informan Penelitian

Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Saat Ini
Alifani	17	SMP	Pelayan Toko Sembako
Cinta	17	SMP	Pelayan Angkringan
Rio	20	SMP	Karyawan Pengrajin Tempe
Dini	21	MA	Pelayan Booth Es Teh
Tia	21	SMP	Pelayan Angkringan
Deva	19	SMP	Pelayan Toko Grosir
Arif	37	S1	Pemilik Angkringan
Heri	42	SMA	Pemilik Usaha Jasa Logistik
Gumun	40	S1	Kepala Desa
Rifan	34	MA	Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali secara mendalam pengalaman, motivasi, serta persepsi anak-anak pekerja dan pemangku kepentingan terhadap isu pendidikan dan peluang ekonomi digital. Pertanyaan disusun mengacu pada fokus penelitian, seperti motivasi bekerja, pandangan terhadap pendidikan, dan pemanfaatan teknologi. Observasi dilakukan di tempat kerja dan lingkungan sosial informan untuk memahami situasi faktual, ritme kerja, serta interaksi sosial mereka. Dokumentasi berupa arsip PKBM, foto kegiatan, dan catatan lapangan digunakan untuk memperkuat data empiris. Kombinasi ketiga teknik ini dirancang untuk menjaga keabsahan dan kedalaman informasi, mengingat sebagian besar data berkaitan dengan isu sosial yang bersifat sensitif.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan data hasil wawancara serta observasi yang relevan dengan tema pemberdayaan dan pengembangan modal manusia melalui pelatihan ekonomi digital. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel analisis tematik, yang menghubungkan temuan empiris dengan kerangka teori Empowerment (Rappaport) dan Human Capital (Becker). Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan induktif, dilakukan melalui proses reflektif dan berulang antara data lapangan dan teori untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena pekerja anak di wilayah semi-perdesaan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan, observasi di berbagai lokasi kerja, serta dokumentasi dari PKBM dan pemerintah desa. Proses ini tidak hanya memastikan validitas temuan, tetapi juga memperkuat argumen analitis mengenai bagaimana pelatihan ekonomi digital dapat berfungsi sebagai sarana pemberdayaan sosial dan peningkatan modal manusia bagi anak-anak pekerja di Sragi.

PEMBAHASAN

Konsep Pekerja Anak dan Kondisi Sosial-Ekonomi di Lapangan

Secara konseptual, pekerja anak merujuk pada individu yang berada di usia produktif belajar namun terpaksa bekerja karena tekanan ekonomi atau sosial. *International Labour Organization* (ILO) melalui Konvensi No. 138 menetapkan bahwa usia minimum anak untuk dipekerjakan adalah 15

tahun, dan secara eksplisit melarang anak di bawah 18 tahun untuk melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan fisik, mental, intelektual, maupun moral mereka. Hal ini ditegaskan dalam pasal yang berbunyi:

“The minimum age for admission to any type of employment or work which by its nature or the circumstances in which it is carried out is likely to jeopardise the health, safety or morals of young persons shall not be less than 18 years.” (Minimum Age Convention, 1973)

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa anak adalah setiap individu berusia di bawah 18 tahun (Pasal 1 Ayat 26), dan secara tegas melarang mempekerjakan anak (Pasal 68). Meskipun demikian, terdapat pengecualian terbatas bagi anak berusia 13–15 tahun dengan durasi kerja maksimal tiga jam per hari dan pengawasan ketat dari orang tua maupun lembaga pendidikan. Secara praktis, pelaksanaan aturan tersebut masih menghadapi tantangan, khususnya di wilayah dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Penelitian lapangan di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, memperlihatkan bahwa sebagian besar informan adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Tabel berikut merangkum karakteristik dan pengalaman kerja para informan utama, sebagaimana tabel 2.

Tabel 2 Profil dan Pengalaman Kerja Informan Utama

Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Pengalaman Kerja	Lama Bekerja
Alifani	17	SMP	Kasir Toko Kosmetik, Helper Pabrik Tekstil, Pelayan Toko Sembako	2 Tahun sejak kelulusan
Cinta	17	SMP	Penjahit Konveksi, Pelayan Angkringan	2 Tahun sejak kelulusan
Rio	20	SMP	Pekerja Konstruksi, Karyawan Pengrajin Tempe	4 Tahun sejak kelulusan
Tia	21	SMP	Buruh Pabrik Garmen, Quality Control Officer, Pelayan Angkringan	5 Tahun sejak kelulusan
Deva	18	SMP	Karyawan Pabrik Wig, Pelayan Toko Grosir	1 Tahun sejak putus sekolah

Penelitian menemukan bahwa sebagian besar informan adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Mereka bekerja di sektor informal seperti konveksi, angkringan, toko, dan pabrik kecil dengan durasi 1–5 tahun pasca putus sekolah. Motif utama bekerja adalah membantu ekonomi keluarga dan keinginan mandiri, disertai faktor sosial dan pendidikan yang memperkuat keputusan tersebut.

Tabel 3. Faktor-Faktor yang Mendasari Keputusan Informan

Faktor	Deskripsi Temuan Lapangan	Ilustrasi Narasi Informan
Ekonomi	Pendapatan keluarga rendah, beban kebutuhan harian tinggi	“Saya bantu orang tua supaya bisa bayar kebutuhan sehari-hari.”
Sosial	Dukungan lingkungan minim, persepsi negatif terhadap pendidikan formal	“Di kampung saya, banyak yang anggap sekolah nggak penting.”
Psikologis	Konflik keluarga, keinginan mandiri, broken home	“Saya lebih nyaman bekerja daripada di rumah.”
Pendidikan	Trauma dan diskriminasi guru, biaya pendidikan tinggi	“Saya berhenti sekolah karena merasa tidak diperlakukan adil.”

Hasil observasi pada tabel 3 diatas memperlihatkan bahwa mayoritas anak pekerja masih menunjukkan agency untuk memperbaiki masa depan mereka, salah satunya dengan menempuh jalur pendidikan non-formal melalui PKBM. Hal ini mencerminkan bentuk self-empowerment di tingkat individu, meskipun dalam keterbatasan struktural dan sosial.

Potensi dan Minat terhadap Ekonomi Digital

Kecamatan Sragi yang terletak di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pematang menghadapi tantangan klasik wilayah semi-perdesaan, yakni keterbatasan infrastruktur ekonomi dan pendidikan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kesempatan kerja formal bagi generasi muda. Namun, wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan memiliki ketertarikan terhadap peluang ekonomi digital, terutama yang berkaitan dengan penggunaan gawai dan media sosial yang sudah menjadi bagian dari keseharian mereka.

Kecamatan Sragi sebagai wilayah semi-perdesaan menghadapi keterbatasan infrastruktur ekonomi dan pendidikan, namun para pekerja muda menunjukkan ketertarikan kuat terhadap aktivitas ekonomi digital. Sebagian informan telah menggunakan media sosial untuk menjual produk atau melakukan siaran langsung (*live streaming*) yang menghasilkan pendapatan tambahan. Keterlibatan mereka dalam aktivitas digital ini menunjukkan adanya digital literacy dasar yang dapat menjadi fondasi pengembangan digital human capital. Meskipun belum terorganisasi secara formal, peluang ekonomi digital mulai dikenali sebagai sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Tabel 4. Pemetaan Aktivitas Digital dan Potensi Pengembangan Keterampilan Informan

Jenis Digital	Aktivitas	Tingkat Ketertarikan	Keterampilan yang Dimiliki	Potensi Pengembangan
E-commerce (jualan online)		Sedang	Terbiasa menggunakan media sosial	Dapat dikembangkan melalui pelatihan pemasaran digital
Freelance (desain, pengetikan)		Rendah	Belum memiliki perangkat kerja	Perlu dukungan fasilitas dan pelatihan teknis
Konten media sosial (live, review produk)		Tinggi	Aktif di TikTok, Instagram	Potensi kuat untuk ekonomi kreatif mikro
Pembuatan produk digital (undangan, promosi)		Sedang	Dasar desain sederhana (Canva)	Bisa diintegrasikan dengan kegiatan PKBM
Pelatihan PKBM	digital	Tinggi	Motivasi belajar mandiri tinggi	Perlu model pelatihan berbasis komunitas

Daritabel 4 diatas menyebutkan sisi struktural, pemberdayaan sosial juga tumbuh melalui inisiatif lokal. Arif (pemilik angkringan) dan Rif'an (anggota dewan) berperan dalam membuka kesempatan kerja dan pendidikan non-formal. Dukungan mikro-komunitas seperti ini menjadi cikal bakal community empowerment, sebagaimana dikemukakan Rappaport (1995), di mana kekuatan sosial muncul dari interaksi antar aktor lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis digital dapat tumbuh secara organik di lingkungan semi-perdesaan melalui kolaborasi sosial, pelatihan berbasis komunitas, dan penguatan motivasi individu. Hal ini menjadi dasar analisis lebih lanjut dalam konteks teori pemberdayaan (Rappaport) dan modal manusia (Becker) pada sub-bab berikutnya.

Urgensi Pemberdayaan dan Modal Manusia dalam Ekonomi Digital

Rappaport (1995) menekankan bahwa pemberdayaan adalah proses di mana individu dan komunitas memperoleh kendali atas hidupnya dengan cara meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang memengaruhi masa depan mereka. Dalam konteks penelitian ini, pemberdayaan tercermin dari inisiatif anak-anak pekerja muda di Sragi untuk tetap mencari alternatif pendidikan (melalui PKBM), serta keterbukaan terhadap peluang ekonomi digital sebagai upaya memperbaiki kondisi hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak selalu hadir dalam bentuk formal seperti program pemerintah, tetapi juga melalui inisiatif sosial dan dukungan mikro-komunitas, seperti peran Arif (pemilik angkringan) yang memberi kesempatan kerja yang manusiawi, serta Rif'an (anggota dewan) yang membuka akses PKBM gratis. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan di tingkat komunitas berjalan organik dan partisipatif, bukan *top-down*. Dalam perspektif Rappaport, situasi ini menunjukkan adanya "*ecological empowerment*", yakni pemberdayaan yang muncul dari relasi antaraktor di lingkungan sosial (antara pekerja muda, pemilik usaha, dan pemerintah lokal) yang saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan sosial (Skene, 2022, p. 502).

Sementara itu, melalui teori Modal Manusia menegaskan bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan akan meningkatkan produktivitas individu serta nilai ekonominya di pasar kerja. Dalam konteks penelitian ini, para pekerja muda di Sragi memiliki keterbatasan modal manusia formal (pendidikan rendah), namun mulai mengembangkan modal manusia non-formal seperti kemampuan komunikasi, pelayanan, dan literasi digital dasar melalui aktivitas kerja mereka (Becker, 1992, p. 88).

Keinginan beberapa informan untuk belajar ekonomi digital, mengikuti PKBM, serta adaptif terhadap teknologi menunjukkan adanya kesadaran investasi jangka panjang terhadap diri sendiri, meski terbatas secara struktural. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan modal manusia tidak selalu bergantung pada pendidikan formal, melainkan dapat diperkuat melalui pelatihan berbasis komunitas dan teknologi digital. Tabel 5. berikut merangkum hasil temuan lapangan yang dikaitkan dengan dua teori utama yang digunakan.

Tabel 5. Analisis Teoretis Pemberdayaan dan Modal Manusia

Temuan Empiris	Analisis Berdasarkan Teori Pemberdayaan (Rappaport)	Analisis Berdasarkan Teori Modal Manusia (Becker)
Anak-anak bekerja karena desakan ekonomi namun tetap berupaya melanjutkan pendidikan di PKBM	Menunjukkan <i>self-empowerment</i> — kesadaran untuk memperbaiki kondisi hidup tanpa menunggu bantuan eksternal	Mengindikasikan investasi minimal terhadap pendidikan meski dengan sumber daya terbatas
Dukungan dari Arif (pemilik angkringan) dan Rif'an (anggota dewan) terhadap anak-anak pekerja	Representasi <i>community empowerment</i> — kolaborasi lintas aktor lokal menciptakan ruang pemberdayaan sosial	Peningkatan <i>on-the-job learning</i> yang menambah keterampilan kerja informal
Ketertarikan terhadap ekonomi digital (e-commerce, freelance, review produk)	Bentuk <i>digital empowerment</i> — anak-anak merasa mampu beradaptasi dengan teknologi dan melihat peluang baru	Potensi peningkatan <i>digital human capital</i> yang dapat menambah nilai ekonomi diri
Trauma pendidikan dan pengalaman diskriminasi guru	Hambatan psikologis terhadap proses pemberdayaan diri;	Gangguan terhadap proses investasi modal manusia formal, tetapi masih bisa

	membutuhkan dukungan sosial yang berkelanjutan	diperbaiki lewat jalur non-formal
Dukungan PKBM dan tokoh lokal dalam membuka pelatihan atau sekolah gratis	Pemberdayaan struktural melalui kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat	Penguatan sumber daya manusia melalui akses pendidikan alternatif

Dari sintesis di atas dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan di Sragi berlangsung dua arah:

- a. *Empowerment* secara horizontal — melalui dukungan komunitas dan solidaritas sosial.
- b. *Empowerment* secara vertikal — melalui kebijakan pendidikan non-formal dan peluang digital yang membuka jalur peningkatan modal manusia.

Temuan ini konsisten dengan Rappaport (1995) yang menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses ekologis di mana individu dan komunitas saling memperkuat dalam menghadapi keterbatasan struktural. Dalam konteks Sragi, inisiatif anak-anak pekerja untuk tetap menempuh pendidikan PKBM dan keterlibatan pelaku lokal seperti Arif dan Rifan menunjukkan bentuk *ecological empowerment* yang tumbuh secara organik dari interaksi sosial. Sejalan dengan teori Modal Manusia Becker (1992), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja informal, kemampuan komunikasi, dan literasi digital dasar merupakan bentuk investasi non-formal yang dapat meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi individu. Dengan demikian, pemberdayaan digital di Sragi dapat dipahami sebagai bentuk integratif antara *ecological empowerment* dan *digital human capital development*, di mana dukungan sosial dan peningkatan keterampilan digital berjalan bersamaan untuk memperkuat kemandirian ekonomi remaja.

Hasil penelitian ini memperkuat beberapa studi sebelumnya, seperti Haniyah (2023) yang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis keterampilan digital mampu meningkatkan kemandirian ekonomi pemuda di daerah semi-urban. Kemudian, penelitian Muna & Aenurofik (2023) yang menemukan bahwa pendidikan non-formal dapat menjadi sarana pemberdayaan sosial bagi remaja putus sekolah.

Namun, penelitian ini mengkritisi model pelatihan digital formal yang terlalu teknokratis dan tidak memperhatikan konteks sosial-psikologis peserta (Damayanti et al., 2025, p. 1587). Kasus di Sragi menunjukkan bahwa pelatihan ekonomi digital harus dikombinasikan dengan pendekatan sosial-humanistik, seperti pendampingan psikologis dan pembinaan komunitas agar mampu menjawab akar permasalahan pekerja anak secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini menambahkan dimensi baru pada kajian pemberdayaan, yakni bahwa "*digital literacy*" dapat berperan sebagai bentuk baru modal manusia bagi kelompok rentan, sekaligus menjadi jembatan antara pendidikan non-formal dan kemandirian ekonomi.

Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan perlunya penyelenggaraan program pelatihan ekonomi digital berbasis komunitas yang terintegrasi dengan PKBM dan sektor informal, agar proses pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga mampu menjangkau kelompok muda yang rentan secara sosial-ekonomi (Kresnawati & Imelda, 2020, p. 229). Upaya ini perlu didukung oleh keterlibatan multi-pihak, meliputi pemerintah desa, pelaku usaha, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial yang berperan dalam memperluas akses, sumber daya, dan jaringan kerja bagi peserta pelatihan. Selain itu, diperlukan pendekatan pembelajaran kontekstual yang mempertimbangkan latar belakang sosial dan psikologis peserta, sehingga pelatihan tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga mampu membangun motivasi, kepercayaan diri, dan kesadaran akan potensi diri mereka. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pelatihan ekonomi digital memiliki urgensi strategis sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pekerja anak, dan memperkuat kemandirian generasi muda di wilayah semi-perdesaan seperti Kecamatan Sragi.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kondisi sosial ekonomi anak-anak yang bekerja di usia sekolah di Kecamatan Sragi didominasi oleh faktor ekonomi keluarga yang lemah, keterbatasan akses pendidikan formal, serta dinamika sosial dan psikologis yang kompleks. Sebagian besar informan merupakan lulusan SMP yang terpaksa bekerja di sektor informal seperti angkringan, toko kelontong, dan industri rumahan demi membantu perekonomian keluarga. Meskipun demikian, terdapat motivasi internal yang kuat untuk tetap melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal seperti PKBM, sekaligus menunjukkan keterbukaan terhadap peluang ekonomi digital sebagai alternatif pengembangan diri. Tantangan utama yang mereka hadapi meliputi keterbatasan finansial, minimnya dukungan sosial dan infrastruktur pendidikan di wilayah perbatasan, serta rendahnya literasi digital dan rasa percaya diri untuk bersaing dalam ekonomi modern. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak pekerja muda memiliki potensi besar untuk berkembang apabila diberikan dukungan pemberdayaan yang tepat dan kontekstual.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Haniyah (2023) dan Muna & Aenurofik (2023) yang menegaskan pentingnya pelatihan berbasis keterampilan digital dan pendidikan non-formal sebagai sarana pemberdayaan sosial-ekonomi bagi remaja putus sekolah. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menyoroti bahwa proses pemberdayaan yang efektif harus berakar pada konteks komunitas lokal dan disertai pendekatan sosial-humanistik. Secara praktis, disarankan agar pemerintah daerah dan lembaga pendidikan memperluas program pelatihan ekonomi digital berbasis komunitas yang terintegrasi dengan PKBM, serta melibatkan berbagai pihak (mulai dari pelaku usaha, organisasi sosial, hingga akademisi) dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan peserta. Pendekatan ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri anak-anak pekerja muda, sekaligus memperkuat modal manusia mereka untuk menghadapi transformasi ekonomi digital. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah informan yang relatif kecil dan cakupan wilayah yang terbatas pada satu kecamatan, sehingga penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan melibatkan lebih banyak lokasi dan variabel untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai pola pemberdayaan anak pekerja di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)*.
- Becker, G. S. (1992). Human capital and the economy. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 136(1), 85–92. <https://www.jstor.org/stable/986801>
- Damayanti, T. E., Dwiharyani, K., & Yasmin, A. (2025). Mengurai kompleksitas komunikasi interpersonal: Sintesis faktor psikologis, sosial, dan kontekstual dari tinjauan literatur. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(4), 1583–1591. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v4i4.5683>
- Das, K., Wibowo, P., Chui, M., Agarwal, V., & Lath, V. (2019). *Automation and the future of work in Indonesia: Jobs lost, jobs gained, jobs changed*.
- Fauzan, A., Utami, D. R., Noviarita, H., & Romlah, R. (2025). Rekonstruksi konsep manajemen biaya dalam pendidikan Islam: Analisis efisiensi, transparansi, dan nilai syariah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 845–860. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i2.173>
- Fitriana, A. Q. Z., Shahmanda, S., & Salamah, L. (2025). Keterbatasan finansial keluarga yang berdampak kepada pendidikan anak. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling*, 3(1), 74–78. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jpdsk/article/view/2633>
- Haniyah, H. (2023). Implementasi perlindungan hak anak terhadap fenomena pekerja anak di Indonesia. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.537>

- International Labour Organization. (1973). *Minimum age convention* (No. 138).
- Kresnawati, K., & Imelda, J. D. (2020). Perlindungan sosial bagi anak usia dini pada keluarga yang rentan sosial ekonomi. *Sosio Informa*, 6(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2363>
- Kusnanto, K., Noviyanti, N., Gudiatto, C., & Usman, U. (2024). Transformasi sosial-ekonomi di masyarakat pedalaman: Integrasi teknologi dan ketahanan pendidikan menengah kebawah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 10(2), 192–202. <https://doi.org/10.23887/jiis.v10i2.82914>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Muna, N. A., & Aenurofik, A. (2023). Pengaruh digitalisasi ekonomi terhadap gaya hidup Generasi Z (Studi kasus pada mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan). *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 143–149. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/885>
- Mustainah, W., Mukhlis, M., & Indrariyani, E. A. (2025). Analisis wacana kritis pemberitaan 100 hari gebrakan Prabowo–Gibran di dunia pendidikan pada media Kompas.com. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 248–266.
- Pungkasari, A. (2023). Problematika ketenagakerjaan anak di Indonesia dan cara menanggulangnya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 13661–13670. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1978>
- Rappaport, J. (1995). Empowerment meets narrative: Listening to stories and creating settings. *American Journal of Community Psychology*, 23(5), 795–807. <https://doi.org/10.1007/BF02506992>
- Ratih, A. (2025). Hubungan tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah anak di Kabupaten Kudus: Studi kuantitatif tentang ketimpangan akses pendidikan dasar. *Jurnal Ekspos*, 3(1), 46–62. <https://ejournal.kuduskab.go.id/index.php/ekspos/article/view/61>
- Skene, K. R. (2022). What is the unit of empowerment? An ecological perspective. *The British Journal of Social Work*, 52(1), 498–517. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcab012>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.